

Pendidikan Inklusif sebagai Fondasi Keadilan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (R.Muktiono Waspodo*)

Pendidikan inklusif merupakan pendekatan pendidikan yang menempatkan seluruh peserta didik sebagai bagian dari sistem pendidikan tanpa diskriminasi. Konsep ini berangkat dari prinsip bahwa setiap anak memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, terlepas dari kondisi fisik, intelektual, sosial, maupun latar belakang budaya. Dengan demikian, pendidikan inklusif tidak hanya berkaitan dengan penyediaan akses pendidikan, tetapi juga dengan upaya menciptakan sistem pendidikan yang mampu merespons keberagaman kebutuhan belajar peserta didik.

Menurut Tony Booth dan Mel Ainscow, pendidikan inklusif adalah suatu proses yang bertujuan meningkatkan partisipasi seluruh peserta didik dalam kegiatan belajar serta mengurangi segala bentuk eksklusi dalam pendidikan. Mereka menegaskan bahwa *inclusion in education involves increasing the participation of students in, and reducing their exclusion from, the cultures, curricula and communities of local schools* (Booth & Ainscow, 2011, hlm. 3). Pernyataan ini menegaskan bahwa pendidikan inklusif bukan sekadar menempatkan peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah reguler, tetapi juga mengubah budaya sekolah agar lebih terbuka terhadap keberagaman.

Pandangan tersebut sejalan dengan perspektif UNESCO, yang menyatakan bahwa pendidikan inklusif merupakan proses memperkuat kapasitas sistem pendidikan untuk menjangkau semua peserta didik, khususnya mereka yang rentan terhadap marginalisasi. UNESCO menyatakan bahwa *inclusive education is a process of addressing and responding to the diversity of needs of all learners* (UNESCO, 2009, hlm. 8). Dengan kata lain, pendidikan inklusif menuntut perubahan kebijakan, kurikulum, dan praktik pembelajaran agar seluruh peserta didik dapat berpartisipasi secara optimal.

Dalam kajian pendidikan kontemporer, implementasi pendidikan inklusif juga berkaitan erat dengan upaya peningkatan mutu pendidikan. Mel Ainscow menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan inklusif sangat bergantung pada kemampuan sekolah untuk melakukan refleksi dan evaluasi terhadap praktik pendidikan yang ada. Ia menyatakan bahwa *schools need to develop processes for reviewing their practices in order to identify and remove barriers to learning and participation* (Ainscow, 2020, hlm. 12). Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan inklusif memerlukan sistem evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pendidikan.

*) Widyaprada |Ahli Utama, Kemdikdasmen

Dalam konteks peningkatan mutu pendidikan, konsep perubahan sistem pendidikan juga dibahas oleh Michael Fullan, yang menyatakan bahwa reformasi pendidikan harus dilakukan secara sistemik melalui proses pembelajaran organisasi dan penggunaan data dalam pengambilan keputusan. Fullan menyatakan bahwa ...educational change depends on what teachers do and think, it's as simple and as complex as that (Fullan, 2016, hlm. 97). Pernyataan ini menegaskan bahwa perubahan dalam pendidikan tidak hanya bergantung pada kebijakan, tetapi juga pada praktik nyata di tingkat sekolah.

Dalam perspektif ini, mengenai pentingnya penjaminan mutu pendidikan berbasis analisis data dan evaluasi berkelanjutan menjadi sangat relevan dengan implementasi pendidikan inklusif (Muktiono Wasposito, 2025) Dalam kerangka tersebut, pendidikan inklusif tidak hanya dipahami sebagai kebijakan sosial yang menjamin akses pendidikan bagi semua peserta didik, tetapi juga sebagai bagian dari strategi peningkatan kualitas pendidikan nasional. Implementasi pendidikan inklusif memerlukan sistem manajemen pendidikan yang mampu mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik, melakukan pemetaan hambatan belajar, serta mengembangkan strategi pembelajaran yang adaptif terhadap keberagaman peserta didik.

Dengan demikian, pendidikan inklusif pada dasarnya merupakan pendekatan pendidikan yang tidak hanya menekankan pada pemerataan akses pendidikan, tetapi juga pada peningkatan kualitas layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik. Dalam perspektif keberhasilan pendidikan inklusif sangat bergantung pada penguatan sistem penjaminan mutu pendidikan yang mampu memastikan bahwa setiap peserta didik memperoleh layanan pendidikan yang bermutu, adil, dan berkelanjutan.

Hakikat, Prinsip, dan Relevansinya dengan Penjaminan Mutu Pendidikan

Hakikat Pendidikan Inklusif

Pada hakikatnya, pendidikan inklusif merupakan pendekatan pendidikan yang menempatkan seluruh peserta didik sebagai bagian integral dari sistem pendidikan tanpa adanya diskriminasi. Pendidikan inklusif berangkat dari prinsip bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu serta kesempatan untuk berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

Menurut Tony Booth dan Mel Ainscow, pendidikan inklusif merupakan suatu proses yang bertujuan meningkatkan partisipasi semua peserta didik dalam kegiatan belajar sekaligus mengurangi segala bentuk eksklusi dalam sistem pendidikan. Mereka menyatakan bahwa "inclusion in education involves increasing the participation of students in, and reducing their exclusion from, the cultures, curricula and communities of local schools" (Booth & Ainscow, 2011, hlm. 3). Pernyataan ini menegaskan bahwa hakikat pendidikan inklusif bukan hanya menempatkan peserta didik berkebutuhan khusus dalam sekolah reguler, tetapi juga mengubah budaya,

kebijakan, dan praktik pendidikan agar lebih responsif terhadap keberagaman. pendidikan inklusif juga berkaitan erat dengan upaya menciptakan sistem pendidikan yang mampu menghargai keberagaman peserta didik. UNESCO menegaskan bahwa pendidikan inklusif merupakan proses untuk merespons keberagaman kebutuhan belajar seluruh peserta didik melalui peningkatan partisipasi dalam pembelajaran serta pengurangan praktik eksklusi dalam pendidikan. UNESCO menyatakan bahwa “inclusive education is a process of addressing and responding to the diversity of needs of all learners” (UNESCO, 2009, hlm. 8).

Dengan demikian, Pendidikan inklusif terletak pada transformasi sistem pendidikan agar mampu memberikan kesempatan belajar yang setara bagi semua peserta didik serta menghapus berbagai hambatan yang menghalangi partisipasi mereka dalam proses pendidikan. Untuk lebih jelas pemaknaan pendidikan inklusif, maka pentingnya untuk mengetahui lebih awal apa saja yang dapat dirumuskan menjadi prinsip-prinsip pendidikan inklusif.

Prinsip-Prinsip Pendidikan Inklusif

Implementasi pendidikan inklusif didasarkan pada sejumlah prinsip dasar yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan pendidikan yang adil dan bermutu. Beberapa prinsip utama pendidikan inklusif antara lain:

1. Prinsip Kesetaraan Hak Pendidikan

Setiap individu memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi. Pendidikan harus terbuka bagi semua peserta didik tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, maupun kondisi fisik. Thomas Hehir menegaskan bahwa sistem pendidikan harus memastikan bahwa semua peserta didik memperoleh akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas (Hehir, 2005, hlm. 6).

2. Prinsip Penghargaan terhadap Keberagaman

Pendidikan inklusif memandang keberagaman sebagai kekuatan yang memperkaya proses pembelajaran. Setiap peserta didik memiliki karakteristik dan kebutuhan belajar yang berbeda sehingga proses pembelajaran harus mampu menyesuaikan dengan keberagaman tersebut.

Menurut Loreman, Deppeler, dan Harvey, pendidikan inklusif menekankan pentingnya menghargai keberagaman sebagai bagian dari proses belajar yang alami dalam lingkungan pendidikan (Loreman, Deppeler, & Harvey, 2010, hlm. 23).

3. Prinsip Partisipasi dan Aksesibilitas

Seluruh peserta didik harus memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan pembelajaran serta memperoleh akses terhadap fasilitas pendidikan yang mendukung proses belajar mereka. Ainscow menekankan bahwa sekolah perlu mengembangkan strategi untuk mengidentifikasi dan menghilangkan berbagai hambatan belajar agar semua peserta didik dapat berpartisipasi secara optimal dalam pendidikan (Ainscow, 2020, hlm. 12).

4. Prinsip Kolaborasi

Pendidikan inklusif memerlukan kerja sama antara berbagai pihak, termasuk guru, orang tua, tenaga kependidikan, dan masyarakat dalam mendukung proses

pendidikan peserta didik. Menurut Florian, keberhasilan pendidikan inklusif sangat bergantung pada budaya kolaboratif di sekolah yang mendukung pembelajaran bagi semua peserta didik (Florian, 2014, hlm. 15).

5. Prinsip Penjaminan Mutu Pendidikan

Pendidikan inklusif harus didukung oleh sistem penjaminan mutu yang memastikan bahwa layanan pendidikan yang diberikan kepada semua peserta didik memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Dalam konteks ini, mengenai pentingnya penjaminan mutu pendidikan berbasis analisis data dan evaluasi berkelanjutan menjadi sangat relevan. Menurut pandangan tersebut, implementasi pendidikan inklusif tidak hanya memerlukan kebijakan normatif, tetapi juga membutuhkan sistem evaluasi yang mampu memantau kualitas layanan pendidikan serta mengidentifikasi berbagai hambatan dalam proses pembelajaran.

Pendidikan inklusif tidak dapat dilepaskan dari upaya peningkatan mutu pendidikan secara sistemik. Michael Fullan menegaskan bahwa perubahan dalam sistem pendidikan memerlukan proses evaluasi berkelanjutan serta penggunaan data sebagai dasar pengambilan keputusan dalam pengembangan kebijakan pendidikan (Fullan, 2016, hlm. 97).

Pendidikan Inklusif dan Penjaminan Mutu Pendidikan

Dalam perspektif ini, pendidikan inklusif harus dipandang sebagai bagian dari strategi peningkatan kualitas pendidikan nasional. Sistem penjaminan mutu pendidikan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa kebijakan pendidikan inklusif tidak hanya menjadi regulasi formal, tetapi juga benar-benar diimplementasikan secara efektif di tingkat satuan pendidikan.

Oleh karena itu, implementasi pendidikan inklusif perlu didukung oleh sistem penjaminan mutu pendidikan yang mampu:

- 1) Mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik secara sistematis.
- 2) Mengembangkan strategi pembelajaran yang adaptif terhadap keberagaman peserta didik.
- 3) Melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap kualitas layanan pendidikan.
- 4) Menggunakan analisis data pendidikan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa pendidikan inklusif harus menjadi bagian dari strategi peningkatan mutu pendidikan nasional yang tidak hanya menekankan pada pemerataan akses pendidikan, tetapi juga pada peningkatan kualitas layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik.

Dalam konteks kebijakan nasional, pendidikan inklusif di Indonesia dipandang sebagai strategi untuk memperluas akses pendidikan bagi semua peserta didik, khususnya bagi anak berkebutuhan khusus. Kementerian Pendidikan menyatakan bahwa pendidikan inklusif bertujuan memberikan kesempatan kepada semua peserta didik untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan potensinya.

Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, dapat disintesis beberapa konsep utama pendidikan inklusif sebagai berikut: Pendekatan ini menunjukkan bahwa pendidikan inklusif harus menjadi bagian dari strategi peningkatan mutu pendidikan nasional

yang tidak hanya menekankan pada pemerataan akses pendidikan, tetapi juga pada peningkatan kualitas layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik.

Sintesis Teori Pendidikan Inklusif

Kajian mengenai pendidikan inklusif berkembang dari berbagai perspektif keilmuan yang menekankan pentingnya keadilan, keberagaman, dan pemerataan akses pendidikan. Berbagai pakar pendidikan internasional maupun nasional telah memberikan kontribusi penting dalam pengembangan konsep pendidikan inklusif. Sintesis teori dari para pakar menunjukkan bahwa pendidikan inklusif bukan hanya pendekatan pedagogik, tetapi juga merupakan paradigma baru dalam sistem pendidikan. Berbagai perspektif pendidikan inklusif dimaksud sebagai berikut;

1. Perspektif Mel Ainscow

Mel Ainscow memandang pendidikan inklusif sebagai proses yang berkelanjutan untuk mengidentifikasi dan menghilangkan hambatan belajar yang dialami peserta didik. Menurutnya, pendidikan inklusif bertujuan meningkatkan partisipasi semua peserta didik dalam pembelajaran serta meminimalkan eksklusi dalam sistem pendidikan. Ainscow menyatakan bahwa sekolah perlu mengembangkan mekanisme refleksi terhadap praktik pendidikan yang ada untuk mengidentifikasi hambatan belajar peserta didik (Ainscow, 2020, hlm.12). Dalam perspektif ini, pendidikan inklusif menekankan pentingnya perubahan sistem pendidikan agar lebih responsif terhadap kebutuhan peserta didik.

2. Perspektif Tony Booth

Tony Booth menekankan bahwa pendidikan inklusif berkaitan dengan transformasi budaya sekolah agar lebih terbuka terhadap keberagaman. Dalam kerangka Index for Inclusion, Booth menekankan bahwa pendidikan inklusif harus mencakup tiga dimensi utama, yaitu budaya inklusif, kebijakan inklusif, dan praktik inklusif (Booth & Ainscow, 2011, hlm. 45). Dengan demikian, pendidikan inklusif tidak hanya menyangkut metode pembelajaran, tetapi juga perubahan sistem nilai dan budaya dalam lingkungan sekolah.

3. Perspektif Thomas Hehir

Thomas Hehir menyoroti pentingnya menghilangkan praktik diskriminasi terhadap peserta didik penyandang disabilitas dalam sistem pendidikan. Ia menyatakan bahwa kebijakan pendidikan harus menghapus berbagai bentuk ableism atau diskriminasi terhadap individu dengan disabilitas. Hehir menegaskan bahwa pendidikan inklusif bertujuan memastikan bahwa semua peserta didik memperoleh kesempatan yang sama untuk belajar dalam lingkungan pendidikan yang inklusif (Hehir, 2005, hlm. 6).

4. Perspektif Loreman, Deppeler, dan Harvey

Loreman, Deppeler, dan Harvey menekankan bahwa pendidikan inklusif harus didukung oleh kompetensi guru dalam mengelola keberagaman peserta didik di kelas. Menurut mereka, keberhasilan pendidikan inklusif sangat bergantung pada kemampuan guru dalam mengembangkan strategi pembelajaran yang fleksibel dan adaptif (Loreman et al., 2010, hlm. 23). Hal ini menunjukkan bahwa penguatan kompetensi guru merupakan faktor kunci dalam implementasi pendidikan inklusif.

5. Perspektif UNESCO

Dalam perspektif global, UNESCO memandang pendidikan inklusif sebagai pendekatan pendidikan yang bertujuan merespons keberagaman kebutuhan peserta didik melalui peningkatan partisipasi dalam pembelajaran serta pengurangan praktik eksklusif dalam pendidikan. UNESCO menyatakan bahwa pendidikan inklusif merupakan proses yang bertujuan memastikan bahwa semua peserta didik dapat belajar bersama dalam lingkungan pendidikan yang menghargai keberagaman (UNESCO, 2009, hlm. 8).

Berdasarkan berbagai pandangan di atas, maka pendidikan inklusif dapat dimaknai sebagai sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik untuk belajar bersama tanpa diskriminasi. Pendidikan inklusif bertujuan menciptakan sistem pendidikan yang menghargai keberagaman serta menjamin hak pendidikan bagi setiap individu. Pendidikan inklusif merupakan pendekatan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus untuk belajar bersama dengan peserta didik lainnya di sekolah reguler dengan dukungan layanan pendidikan yang sesuai

Kesimpulan

Berbagai pandangan terkait dengan pendidikan inklusif, dapat disintesis yakni (1) Pendidikan inklusif merupakan pendekatan pendidikan yang menjamin kesetaraan akses pendidikan bagi semua peserta didik; (2) Pendidikan inklusif menekankan penghargaan terhadap keberagaman peserta didik dalam proses pembelajaran; (3) Pendidikan inklusif memerlukan perubahan sistem pendidikan secara menyeluruh, termasuk budaya sekolah, kebijakan pendidikan, dan praktik pembelajaran; (4) Pendidikan inklusif memerlukan kompetensi guru dalam mengelola keberagaman peserta didik; (5) Pendidikan inklusif harus didukung oleh sistem penjaminan mutu pendidikan yang berkelanjutan.

Pendidikan inklusif tidak hanya berkaitan dengan perluasan akses pendidikan, tetapi juga berkaitan dengan jaminan mutu layanan pendidikan bagi setiap peserta didik. Oleh karena itu, implementasi pendidikan inklusif perlu didukung oleh sistem penjaminan mutu pendidikan yang mampu: (1) Mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik; secara sistematis, (2) Mengembangkan strategi pembelajaran yang adaptif terhadap keberagaman peserta didik; dan (3) Melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap kualitas layanan pendidikan;

Hakikat pendidikan inklusif terletak pada upaya menciptakan sistem pendidikan yang menghargai keberagaman dan memberikan kesempatan belajar yang setara bagi semua peserta didik. Prinsip-prinsip pendidikan inklusif seperti kesetaraan hak, penghargaan terhadap keberagaman, partisipasi aktif, kolaborasi, dan penjaminan mutu menjadi landasan penting dalam implementasi pendidikan yang inklusif. Keberhasilan pendidikan inklusif sangat bergantung pada penguatan sistem penjaminan mutu pendidikan yang mampu memastikan bahwa setiap peserta didik memperoleh layanan pendidikan yang bermutu, adil, dan berkelanjutan.

Penjaminan mutu pendidikan inklusif harus dilakukan melalui siklus yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan. Melalui pendekatan tersebut, sistem pendidikan dapat secara sistematis mengidentifikasi kebutuhan peserta didik, mengembangkan strategi pembelajaran yang adaptif, serta memastikan bahwa setiap peserta didik memperoleh layanan pendidikan yang bermutu.

Daftar Referensi

- Ainscow, M. (2020). Promoting Inclusion and Equity in Education. *Nordic Journal of Studies in Educational Policy*.
- Booth, T., & Ainscow, M. (2011). *Index for Inclusion: Developing Learning and Participation in Schools* (3rd ed.). Bristol: Centre for Studies on Inclusive Education.
- Hehir, T. (2005). *New Directions in Special Education: Eliminating Ableism in Policy and Practice*. Cambridge: Harvard Education Press.
- Ilahi, M. T. (2013). *Pendidikan Inklusif: Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Loreman, T., Deppeler, J., & Harvey, D. (2010). *Inclusive Education: Supporting Diversity in the Classroom*. London: Routledge.
- Sunardi. (2010). *Pendidikan Inklusif untuk Anak Berkebutuhan Khusus*. Bandung: UPI Press.
- UNESCO. (2009). *Policy Guidelines on Inclusion in Education*. Paris: UNESCO.